

**DUKUNGAN DHARMA WANITA TERHADAP
PROGRAM KELUARGA BERENCANA (KB) 1974-1979**

Dian Novilla Febriati

Jurusan Pendidikan Sejarah, Fakultas Ilmu Sosial

Universitas Negeri Surabaya

E-mail: diannovillafebriati@yahoo.co.id

Abstract

Dharma Wanita always be organizations that participated in the success of government programs such as family planning. Various attempts were made by Dhrama wanita in order to make the program successful KB. It is interesting to study the background of what Dharma Wanita establishment in 1974, why Dharma Wanita support the government family planning program in 1974-1979, as well as how the work done to support the Dharma Wanita. This study aims to as well as explain the Dharma Wanita in the success of the business planning program 1974-1979. Historical method used in this study include heuristics, internal criticism, interpretation, and historiography with reference of library materials and other relevant references Dharma Wanita formation due to the desire of the New Order government to homogenize all organizational activities wives of employees, as well as to enable the government to control all the activities of employee organizations wife. Wide effort is made by Dharma Wanita for the success of the government family planning program includes the establishment of project planning, motivation and information about family planning and population, a review of family planning activities in several provinces Dharma Wanita and making family planning clinics.

Keywords: Dharma Wanita, New Order, KB

Abstrak

Dharma Wanita selalu organisasi yang berpartisipasi dalam keberhasilan program pemerintah seperti keluarga berencana. Berbagai upaya dilakukan oleh Dhrama Wanita untuk membuat KB kesuksesan program. Sangat menarik untuk mempelajari latar belakang apa Dharma Wanita berdirinya pada tahun 1974, mengapa Dharma Wanita mendukung program keluarga berencana pemerintah 1974-1979, serta bagaimana pekerjaan dilakukan untuk mendukung Dharma Wanita. Penelitian ini bertujuan untuk serta menjelaskan Dharma Wanita dalam keberhasilan program perencanaan bisnis 1974-1979. Metode historis yang digunakan dalam penelitian ini meliputi heuristik, kritik intern, interpretasi, dan historiografi dengan referensi bahan pustaka dan references Dharma pembentukan Wanita lain yang relevan karena keinginan pemerintah Orde Baru untuk menghomogenkan semua istri kegiatan organisasi karyawan, serta mengaktifkan pemerintah untuk mengendalikan semua kegiatan organisasi istri pegawai. Upaya lebar dibuat oleh Dharma Wanita untuk keberhasilan program keluarga berencana pemerintah mencakup pembentukan perencanaan proyek, motivasi dan informasi tentang keluarga berencana dan kependudukan, review kegiatan keluarga berencana di beberapa provinsi Dharma Wanita dan membuat klinik keluarga berencana.

Kata kunci: Dharma Wanita, Orde Baru, KB

PENDAHULUAN

Munculnya organisasi-organisasi wanita Indonesia bukan lagi menjadi hal yang baru bagi bangsa Indonesia. Organisasi wanita Indonesia pertama kali muncul pada masa pemerintahan Hindia Belanda. Organisasi tersebut bernama Poetri Mardika, yang berdiri pada tahun 1912 di Jakarta atas prakarsa Budi Utomo.¹ Setelah kemunculan Poetri Mardika, kemudian muncul berbagai organisasi-organisasi wanita lainnya.

Kemunculan organisasi-organisasi wanita pada setiap masa selalu diikuti dengan tujuan pembentukan yang berbeda-beda, bergantung pada situasi dan kondisi saat itu. Poetri Mardika yang muncul pada masa pemerintahan Hindia Belanda memiliki tujuan pembentukan yaitu memberikan bantuan, bimbingan, dan penerangan kepada gadis pribumi dalam menuntut pelajaran, menyatakan pendapat di muka umum, memperbaiki hidup wanita sebagai manusia yang mulia serta memberi bea siswa kepada wanita untuk bersekolah.² Hal ini disebabkan oleh pengajaran untuk

¹ Nany Soedarsono, dkk, *Sejarah Setengah Abad Pergerakan Wanita Indonesia*, (Jakarta: PN Balai Pustaka, 1978), hlm. 16

² *Ibid.*,

anak perempuan memang sangat sedikit sekali dan orang tua tidak mengizinkan anak gadis mereka untuk pergi bersekolah terkait adat istiadat saat.³ Organisasi wanita yang muncul pada masa Orde Baru, terutama yang dibentuk oleh pemerintah Orde Baru tentunya memiliki tujuan yang berbeda dengan masa sebelumnya. Pemerintah memang sengaja membentuk organisasi wanita dengan tujuan untuk menghimpun dukungan dan partisipasi kaum wanita dalam mensukseskan pembangunan nasional yang sedang dilaksanakan. Hal ini mengakibatkan organisasi-organisasi wanita tersebut bersifat non politik. Kegiatannya kurang berperan penting dalam meningkatkan kesadaran politik perempuan dan hanya sibuk melaksanakan kegiatan sosial dalam upaya mendukung dan mensukseskan pembangunan nasional.⁴

Peran wanita dalam mensukseskan pembangunan nasional pada saat itu, memang lebih ditekankan pada usaha-usaha yang berhubungan dengan kemasyarakatan, seperti program Keluarga Berencana (KB), Pemberantasan Buta Huruf, perawatan anak-anak yang tidak mampu, dan lain-lain. Hal ini disesuaikan dengan kemampuan yang ada dan sesuai dengan kekhususan sifat-sifat organisasi wanita.⁵ Di antara sekian banyak program yang dikeluarkan oleh pemerintah Orde Baru, KB merupakan program yang bisa dikatakan paling sukses dalam menekan laju pertumbuhan penduduk untuk meningkatkan kesejahteraan keluarga melalui pembatasan kelahiran. Selama masa pemerintahan Orde Baru, program KB dinilai paling sukses pada tahun 1970-1980. Kesuksesan program KB ini tampak dari keberhasilan program KB dalam menekan laju pertumbuhan penduduk dari 2,8% menjadi 2,3%.⁶

Sejak zaman Orde Baru (1966-1998), Indonesia mengikuti kebijakan kependudukan 'anti natalitas'.⁷ Salah satu cara yang ditempuh pemerintah dalam mengatasi laju pertumbuhan penduduk yaitu melalui program KB. Program KB sendiri telah dikembangkan oleh pemerintah Orde Baru sejak Pembangunan Lima

Tahun (pelita) I yaitu tahun 1969-1974. Pada tahun 1969 program KB memang sudah diresmikan menjadi program nasional melalui Instruksi Presiden Republik Indonesia No. 26 Tahun 1968.⁸ Kemudian pada pelita II (1974-1979) KB makin ditingkatkan pelaksanaannya. Program KB menjadikan wanita sebagai sasaran utamanya untuk pengendalian kesuburan. Beragam alat kontrasepsi untuk mengendalikan fungsi reproduksi lebih dititik beratkan kepada wanita, sehingga keberhasilan program KB memang tidak lepas dari peran wanita termasuk organisasi wanita saat itu, seperti Dharma Wanita.⁹

Dharma Wanita merupakan organisasi gabungan yang beranggotakan semua organisasi istri pegawai negeri sipil, yang berada dalam lingkungan departemen, lembaga tinggi negara, kerjasama agung, pemerintah daerah, bank milik negara dan perusahaan-perusahaan milik negara.¹⁰ Organisasi ini dibentuk pada tanggal 5 Agustus 1974 di Jakarta.¹¹ Di lingkungan departemen atau lembaga-lembaga pemerintah non departemen sebenarnya sudah ada beberapa organisasi istri pegawai seperti Pertiwi.¹² Akan tetapi semua organisasi-organisasi istri pegawai yang sudah ada tersebut kemudian disatukan ke dalam satu wadah, yaitu Dharma Wanita. pembentukan Dharma Wanita dikarenakan adanya keinginan pemerintah untuk menyeragamkan seluruh kegiatan organisasi istri pegawai, sehingga dukungan mereka dapat lebih terarah, berdaya guna dan berhasil guna, serta tidak bertentangan dengan pemerintah.

Dharma Wanita menjadi sebuah organisasi wanita bagi semua istri pegawai negeri. Semua istri pegawai negeri di setiap tingkatan pemerintah dan departemen pemerintahan wajib menjadi anggota Dharma Wanita sebagai wujud loyalitas kepada suami dan negara. Dharma Wanita menjadi organisasi yang kegiatannya searah dan sehaluan dengan tugas pegawai negeri yang tergabung dalam Korps Pegawai Republik Indonesia (KORPRI), serta selalu ikut berpartisipasi mensukseskan program pemerintah seperti KB.

Pada masa Orde Baru semua istri pegawai negeri sipil yang menjadi anggota Dharma Wanita ikut dalam mensukseskan program KB nasional. Keberadaan BKKBN sebagai lembaga yang bertugas mengkoordinir usaha-usaha yang berhubungan dengan KB, dan berada

³ A. K. Pringgodigdo, *Sejarah Pergerakan Rakyat Indonesia*, (Jakarta: Dian Rakyat, 1994), hlm. 22

⁴ Tapi Ormas Ihromi, Sulistiyowati Irianto, dan Achie Sudiarti Luhulima, *Penghapusan Diskriminasi Terhadap Perempuan*, (Bandung: Alumni, 2006), hlm. 298

⁵ "Sambutan Ibu Tien Soeharto Pada HUT Dharma Wanita Pada Tanggal 3 Agustus 1978 Di Jakarta" *Dharma Wanita*, Agustus 1978, hal 8-9

⁶ Akhmad Zaeni, "Implementasi Kebijakan Program Keluarga Berencana Di Kabupaten Batang (Studi Kasus Peningkatan Kesertaan KB Pria Di Kecamatan Gringsing)", *Tesis-S2 Jurusan Magister Ilmu Administrasi Universitas Diponegoro* 2006, hlm.3

⁷ Daldjoeni, *Masalah Penduduk dalam Fakta dan Angka*, (Bandung: Alumni, 1981), hlm. 162

⁸ Daldjoeni, *loc.cit.*,

⁹ Emmerson K. Donald, *Indonesia Beyond Soeharto : Negara, Ekonomi, Masyarakat, Transisi*. (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2001), hlm . 441

¹⁰ *Warta Berita*, Tanggal 6 Agustus 1974

¹¹ Nany Soedarsono, dkk, *loc.cit.*,

¹² Dharma Wanita, *Dwi Windu Dharma Wanita 5 Agustus 1974-5 Agustus 1990*, (Jakarta: Dharma Wanita, 1990), hlm. 8

langsung di bawah presiden, maka BKKBN dapat mengkoordinir semua departemen untuk ikut mensukseskan KB. Selain mengkoordinir semua departemen BKKBN juga dapat memanfaatkan kegiatan KB dari sektor swasta, dengan mengajak organisasi wanita seperti Dharma Wanita untuk ikut terlibat di dalamnya. Berbagai usaha dilakukan oleh Dharma Wanita dalam mendukung program KB.

Artikel ini mencoba untuk menjelaskan mengenai bagaimana usaha yang dilakukan Dharma Wanita untuk mendukung. Penelitian yang berjudul “Dukungan Dharma Wanita Terhadap Program Keluarga Berencana (KB) 1974-1979” memiliki dua konsep. Konsep pertama adalah pengertian Dharma Wanita. Menurut buku karangan Nany Soedarsono dkk yang berjudul *Sejarah Setengah Abad Pergerakan Wanita Indonesia*, Dharma Wanita adalah organisasi persatuan yang anggotanya terdiri dari organisasi-organisasi istri pegawai negeri sipil yang ada pada departemen-departemen dan lembaga-lembaga non departemen.

Konsep kedua adalah pengertian KB. Menurut buku yang diterbitkan oleh Departemen Penerangan yang berjudul *Rencana Pembangunan Lima Tahun Kedua 1974/75 - 1978/79*, KB adalah program kebijakan kependudukan. KB menjadi cara yang ditempuh untuk menekan laju pertumbuhan penduduk dengan pembatasan kelahiran.

Penulisan artikel ini memiliki tujuan dan manfaat. Tujuan dari penulisan artikel ini yaitu menjelaskan usaha Dharma Wanita dalam mensukseskan program KB 1974-1979. Manfaat yang diharapkan dalam penulisan artikel ini adalah dapat memberikan informasi mengenai usaha Dharma Wanita sebagai organisasi yang sengaja dibentuk oleh pemerintah Orde Baru, dalam mendukung pembangunan nasional yang dilakukan oleh pemerintah saat itu.

METODE

Dalam penelitian yang mengkaji tentang “Dukungan Dharma Wanita Terhadap Program Keluarga Berencana (KB) 1974-1979” penulis menggunakan metode penelitian sejarah. Ada empat tahapan di dalam metode penelitian sejarah yaitu: Langkah awal yang dilakukan yaitu heuristik. Pada awal tahap ini penulis mengumpulkan sumber-sumber yang terkait dengan dukungan Dharma Wanita terhadap program KB 1974-1979. Sumber-sumber tersebut dapat berupa Surat Keputusan Presiden, Instruksi Presiden, majalah dan koran sejaman, data statistik fertilitas dan akseptor, serta buku-buku yang dapat memberikan informasi seputar Dharma Wanita dan KB. Sumber-sumber tersebut penulis peroleh dari Perpustakaan Pusat Nasional Jakarta, Badan

Pusat Statistik (BPS) Jakarta, BKKBN Provinsi Jawa Timur, dan Arsip Nasional Jakarta.

Langkah kedua yaitu kritik intern. Pada tahap ini penulis melakukan pengujian terhadap validitas data yang sudah didapat dan mengkritisi data yang berkaitan dengan Dharma Wanita dan KB. Melalui uji validitas serta kritisi terhadap data maka diperoleh fakta sejarah mengenai dukungan Dharma Wanita terhadap program KB 1974-1979.

Langkah ketiga yaitu interpretasi atau penafsiran. Fakta-fakta sejarah mengenai Dharma Wanita dan KB yang sudah diperoleh penulis pada tahap sebelumnya disusun sehingga dapat terjadi rekonstruksi fakta sejarah mengenai dukungan Dharma Wanita terhadap KB 1974-1979. Selain itu, pada tahap ini penulis juga mencocokkan fakta satu dengan fakta yang lain. Kegiatan ini berakhir dengan terjawabnya semua rumusan masalah, yang kemudian dilanjutkan ke tahap selanjutnya.

Setelah terjadi rekonstruksi sejarah dalam proses interpretasi, maka pada tahap terakhir ini dilakukan historiografi yaitu penulisan laporan penelitian berupa artikel sebagai hasil penelitian sejarah tentang dukungan Dharma Wanita terhadap program Keluarga Berencana (KB) 1974-1979.

PROGRAM KB 1974-1979

KB sebenarnya sudah ada di Indonesia sejak tahun 1957. Kegiatan KB saat itu hanya dilaksanakan oleh suatu perkumpulan swasta yang bernama Perkumpulan Keluarga Berencana Indonesia (PKBI).¹³ Belum adanya dukungan pemerintah saat itu, membuat program KB tidak berjalan secara maksimal di masyarakat. Baru pada tahun 1967, terjadi persiapan-persiapan pelaksanaan program KB Nasional.

Berbagai keputusan dikeluarkan oleh pemerintah guna mensukseskan pembangunan nasional. Pada tahun 1968 Presiden menginstruksikan kepada Menteri Negara Kesejahteraan melalui keputusan Presiden (Keppres) No. 26 Tahun 1968 untuk membentuk lembaga semi pemerintah, yaitu Lembaga Keluarga Berencana Nasional (LKBN) yang bertugas untuk mengkoordinasi kegiatan KB. Dijadikannya KB sebagai program nasional, maka pada tahun-tahun 1969 KB dimasukkan ke dalam program pembangunan nasional pelita I. Kurang lebih satu tahun kemudian pemerintah menanggapi bahwa KB harus dilaksanakan sendiri oleh pemerintah, sehingga pemerintah membentuk Badan Koordinasi Keluarga

¹³ BKKBN Jawa Timur, *Program Keluarga Berencana*, (Jakarta: BKKBN Jawa Timur, 1979), hlm.3

Berencana Nasional (BKKBN) pada tahun 1970 melalui Keppres No. 8 tahun 1970. Melihat program KB yang jangkauannya sangat luas dan dilaksanakan secara menyeluruh, maka BKKBN sebagai lembaga yang berada langsung di bawah presiden mengkoordinir seluruh departemen untuk ikut membantu mensukseskan program KB sesuai bidangnya. Selain itu, sebagai badan yang disertai tanggung jawab mengenai pelaksanaan KB, maka BKKBN juga memanfaatkan kegiatan-kegiatan KB dari sektor swasta.

Dalam upaya memperkuat dan meningkatkan status BKKBN, maka pemerintah mencabut kembali Keppres No.8 tahun 1970 dan diganti dengan Keppres No. 33 tahun 1972. Pada dasarnya antara Keppres No. 8 tahun 1970 dengan Keppres No. 33 tahun 1972 tidak mempunyai perubahan yang fundamental, hanya saja dalam Keppres No. 33 tahun 1972 lebih ditegaskan mengenai peranan Kepala Daerah Gubernur dan Bupati sebagai penanggung jawab umum penyelenggaraan program KB di daerah, sedangkan koordinasi penyelenggara dilakukan oleh BKKBN dan pelaksanaannya adalah unit pelaksana setempat.¹⁴ Keppres ini menjadi landasan pelaksanaan program KB dari pusat hingga daerah, termasuk program KB tahun 1974-1979.

Program KB pada pelita II (1974-1979) berbeda dengan program KB pada pelita I (1970-1974). Perbedaan program KB antara pelita I dengan pelita II terletak pada jangkauan wilayah program KB. Jika pada masa pelita I jangkauan program KB nasional hanya ditekankan pada wilayah Jawa dan Bali saja, maka pada masa pelita II meningkat menjadi Jawa, Bali, Aceh, Sumatera, Kalimantan Barat, Kalimantan Selatan, Sulawesi Utara, Sulawesi selatan dan Nusa Tenggara Barat. Hal ini bukan berarti di luar wilayah tersebut tidak terdapat program KB, melainkan tetap terdapat program KB hanya pelaksanaannya tidak begitu ditekankan karena pelaksanaan program KB sendiri dilakukan secara bertahap. Pelaksanaan program KB di pusat tetap menjadi tanggung jawab pemerintah pusat sedangkan di daerah menjadi tanggung jawab pemerintah daerah setempat. Semua program KB yang ada di daerah dilaporkan dan dipertanggung jawabkan oleh Kepala Daerah kepada pemerintah pusat. Kepala Daerah memberikan laporan umum dan pertanggung jawaban kepada Presiden melalui Menteri Dalam Negeri. Selain itu, terkait pelaksanaan secara teknis administratif, para

Kepala Daerah ini langsung berhubungan dengan BKKBN Pusat.¹⁵

Pelaksanaan program KB di pusat pada tahun 1974-1979 dilakukan oleh BKKBN Pusat. Dalam melaksanakan tugasnya BKKBN Pusat bertanggung jawab langsung kepada Presiden. Agar program KB yang dijalankan dapat berjalan sukses, BKKBN Pusat tidak bekerja sendiri, melainkan menkoordinir semua departemen-departemen yang ada di pusat untuk ikut berpartisipasi dalam mensukseskan program KB sesuai dengan bidangnya masing-masing. Departemen-departemen yang dikoordinir BKKBN Pusat untuk ikut melaksanakan program KB, meliputi Departemen Dalam Negeri, Departemen Kesehatan, Departemen Penerangan, Departemen Agama, Departemen Sosial, Departemen Pendidikan dan kebudayaan, Departemen Keuangan, Departemen Hankam, dan Badan Perencana Pembangunan Nasional (Bappenas).¹⁶

Selain melibatkan Departemen-departemen yang ada di Pusat, BKKBN Pusat juga melibatkan pihak swasta.¹⁷ Pihak swasta di sini maksudnya adalah organisasi baik organisasi wanita atau pun bukan. Dharma Wanita sebagai organisasi wanita yang dibentuk oleh pemerintah, serta kegiatannya searah dan sehaluan dengan tugas suami sebagai aparatur negara yang juga ikut terlibat dalam mensukseskan program KB nasional, maka juga harus ikut serta dalam mensukseskan program KB. Keikutsertaan seluruh lapisan masyarakat membuat program KB menjadi sukses, tetapi kesuksesan program KB ini juga tidak dapat dilepaskan oleh peranan pihak asing.

Bantuan dari pihak asing, juga ikut mensukseskan pelaksanaan program KB saat itu. Pihak-pihak asing ini berperan memberikan bantuan dana kepada Indonesia, agar pelaksanaan program KB dapat berjalan sukses. Donor-donor besar yang berperan dalam mensukseskan program KB nasional adalah Astra International Daihatsu(AID), International Bank for Reconstruction and Development (IBRD), dan United Nations fund for Population Activities (UNFPA).¹⁸

PROGRAM KERJA DHARMA WANITA 1974-1979

Program kerja Dharma Wanita merupakan suatu rencana kegiatan yang akan dilakukan oleh Dharma Wanita selama lima tahun ke depan. Program kerja Dharma Wanita dibuat oleh Dharma Wanita pusat melalui Munas, dan program kerja ini nantinya akan menjadi pedoman

¹⁵ Keputusan bersama antara Menteri Dalam Negeri dan Ketua BKKBN No.147 Tahun 1971/No. 247 Tahun 1971

¹⁶ BKKBN Jawa Timur, *op.cit.*, hlm. 5

¹⁷ *Ibid.*, hlm. 8

¹⁸ *Ibid.*, hlm.4

¹⁴ *Ibid.*,

kerja semua Dharma Wanita dari tingkat provinsi hingga kabupaten. Di dalam program kerja Dharma Wanita 1974-1979 dijelaskan mengenai kegiatan-kegiatan yang akan dilakukan oleh Dharma Wanita selama lima tahun ke depan. Selain itu, juga dicantumkan mengenai program-program pemerintah yang kegiatannya akan didukung oleh Dharma Wanita. Di antara sekian banyak program pemerintah, KB menjadi salah satu program yang dicantumkan di dalam program kerja Dharma Wanita.

Dalam program kerja Dharma Wanita, KB masuk ke dalam bidang sosial-budaya. Bidang ini berisi mengenai kegiatan Dharma Wanita yang berhubungan dengan peningkatan kesejahteraan keluarga pegawai Republik Indonesia. Dalam program kerja tersebut, juga dijelaskan mengenai upaya yang akan dilakukan oleh Dharma Wanita dalam mensukseskan program KB. Upaya yang dilakukan oleh Dharma Wanita untuk mensukseskan program KB yaitu memberikan penerangan mengenai KB, menjadikan semua istri/ibu organisasi anggota sebagai akseptor KB, serta bekerja sama dengan badan-badan pemerintah dan non pemerintah yang mengurus pelaksanaan KB di pusat maupun daerah.¹⁹ Agar partisipasi Dharma Wanita dapat berdaya guna dan bermutu dalam mensukseskan program KB, maka dilakukan inventarisasi dan pemanfaatan anggota-anggota dari organisasi anggota yang memiliki keahlian dalam bidang Keluarga Berencana. Tujuan yang ingin dicapai oleh Dharma Wanita dalam program KBnya yaitu:

“... a) menjadikan pasangan subur yang istrinya tergabung dalam organisasi anggota Dharma Wanita, akseptor KB; b) pembinaan para akseptor KB yang mantap menjadi motivator KB, dalam lingkungan masing-masing; c) meningkatkan akseptor lestari menjadi distributor; d) pembudayaan ide KB di lingkungan Dharma Wanita dan seluruh masyarakat Indonesia, hingga pengertian “keluarga kecil yang bahagia dan sejahtera” menjadi keyakinan dan mendarah daging dalam tiap manusia Indonesia....”²⁰

USAHA DHARMA WANITA Mendukung PROGRAM KB 1974-1979

Usaha yang dilakukan Dharma Wanita dalam mendukung program KB, disamping mencantumkan program KB di dalam program kerjanya tahun 1974-1979 yaitu meliputi pembentukan proyek KB, motivasi dan penerangan tentang KB dan kependudukan, peninjauan terhadap

kegiatan KB Dharma Wanita di beberapa provinsi serta pembuatan klinik KB. **Pertama**, pembentukan proyek KB. Dharma Wanita menyebut proyek KBnya ini sebagai program KB Dharma Wanita. Proyek KB ini dibentuk pada tanggal 25 Mei 1976 dalam rapat anggota Dharma Wanita Pusat. Dalam rapat anggota tersebut dibentuk team pembina KB di bawah Seksi Kesejahteraan Sosial Dharma Wanita Pusat. Inti dari tujuan proyek KB Dharma Wanita ini sebenarnya adalah membantu pemerintah mensukseskan program KB dengan mengajak seluruh anggota Dharma Wanita untuk ikut serta dalam proyek KBnya. Keterlibatan anggota Dharma Wanita dalam proyek KB Dharma Wanita tercermin dalam susunan pengurus proyek KB Dharma Wanita yang terdiri dari “Ketua Proyek : Ny. Ali Whardana, Ny. Adam Malik, Ny. Widjojo Nitisastro; Team Pembina: Ny. Soewardjono, Ny. I. Soebagiyo, Ny. Soengeng Soepari; Team Pelaksana: Ny. Ely Soengkono, Ny. Soedarsono, Ny. Katili, Ny. Agung Juwono”. Selain itu, pengurus Dharma Wanita pusat dalam penyelenggaraan ceramah tentang KB di Graha Swala pada tanggal 3 Februari 1977, meminta para pimpinan dan ibu-ibu yang ada di masing-masing departemen/lembaga pemerintah untuk menentukan kebijakan KB di lingkungannya masing-masing. Hal ini sesuai yang tercantum di dalam proyek KB Dharma Wanita yaitu:

“... karena ruang lingkup Dharma Wanita adalah keluarga karyawan departemen dan non departemen, maka untuk dapat melaksanakan rencana proyek diperlukan: (1) Bantuan dan dukungan dari pimpinan Departemen atau lembaga agar berhasil baik; (2) Ibu-ibu dari organisasi departemen/lembaga itu sendiri yang mengatur program di tiap-tiap departemen/lembaga pemerintah non departemen....”²¹

Keterlibatan anggota Dharma Wanita dalam proyek KB Dharma Wanita juga dapat dilihat dari pembentukan kader inti KB. Kader inti merupakan perwakilan dari organisasi anggota, yang nanti akan ditugaskan untuk memberikan motivasi dan penerangan tentang KB terhadap anggota Dharma Wanita di lingkungan masing-masing. Keberadaan kader inti dalam mensukseskan program KB juga tidak dapat dipisahkan dari peran BKKBN.

Hubungan kerjasama antara Dharma Wanita dan BKKBN, dilakukan dengan cara melibatkan BKKBN ke dalam proyek KB Dharma Wanita tahun 1974-1979. Dalam program kerja Dharma Wanita khususnya yang menyangkut KB, dinyatakan bahwa dalam mensukseskan program KB pemerintah Dharma Wanita bekerja sama dengan badan-badan pemerintah dan non pemerintah yang mengurus pelaksanaan KB di pusat maupun daerah.

¹⁹ Dharma Wanita, *pancawarsa Dharma Wanita 5 Agustus 1974-5 Agustus 1979*, (Jakarta: Dharma Wanita, 1979), hlm.449

²⁰ *Ibid.*,

²¹ *Ibid.*,

Badan pemerintah yang mengurus pelaksanaan KB salah satunya adalah BKKBN. Keterlibatan BKKBN di dalam proyek KB Dharma Wanita ini dapat dilihat dari pemberian latihan tentang KB serta pembinaan rutin kepada kader inti KB Dharma Wanita.

BKKBN secara bertahap memberikan pelatihan tentang KB kepada kader inti Dharma Wanita. Latihan ini ditujukan agar para kader inti KB Dharma Wanita ini nantinya dapat bertugas dengan baik sebagai motivator KB di lingkungan masing-masing. Pada tanggal 14-17 Februari dan 21-23 Februari 1977 di Jakarta, diadakan latihan kader inti KB Dharma Wanita oleh BKKBN.²² Dalam latihan ini BKKBN memberikan pengetahuan dasar mengenai KB. Pada tanggal 29-30 Maret 1977 diadakan latihan “sistem pembinaan program KB” dengan memberikan pengetahuan untuk membuat evaluasi data.²³

Selain memberikan latihan, BKKBN juga memberikan pembinaan secara rutin kepada kader inti KB Dharma Wanita. Pembinaan secara rutin ini dilakukan setiap bulan oleh para kader inti KB Dharma Wanita dan BKKBN, di kantor pusat BKKBN. Pembinaan rutin ini bertujuan untuk menambah pengetahuan serta keterampilan mengenai KB dengan cara evaluasi hasil kinerja para kader inti, ceramah penyegaran tentang kontrasepsi dan perkembangannya sampai sekarang, pengetahuan tentang desas-desus dan kasus medis dan non medis, pemutaran film dan slide. Tidak jarang pembinaan rutin ini juga dilakukan dengan peninjauan lapangan oleh BKKBN.²⁴

Kedua Motivasi dan penerangan mengenai KB. Motivasi dan penerangan bertujuan untuk meningkatkan pengetahuan, sikap, dan praktek KB baik di kalangan peserta baru KB maupun di kalangan peserta KB lestari yang ada, sehingga penggunaan alat kontrasepsi dapat ditingkatkan. Berkaitan dengan kegiatan ini di lingkungan anggota Dharma Wanita, kegiatan ini biasanya dilakukan oleh petugas BKKBN yang memang sengaja diundang oleh Dharma Wanita atau pun anggota Dharma Wanita yang masuk ke dalam anggota kader inti KB Dharma Wanita. Pemberian motivasi dan penerangan KB ini, tidak harus ceramah tentang KB saja tetapi juga ceramah kependudukan. Berikut beberapa contoh kegiatan penerangan dan motivasi yang dilakukan oleh BKKBN ataupun kader inti KB Dharma Wanita kepada organisasi anggota Dharma Wanita:

1. Pemberian ceramah yang dilakukan oleh petugas BKKBN dari pusat saat meninjau KB di Maluku kepada para ibu-ibu anggota Dharma Wanita. ceramah tersebut

mengenai program KB saat itu, terutama peran Persatuan Keluarga Berencana Indonesia (PKBI) dalam program nasional serta KB jika ditinjau dari segi kesehatan²⁵

2. Pemberian ceramah yang dilakukan oleh kader inti Dharma Wanita di organisasi Eka Dharma Santi (Wanita Tenaga Kerja Transmigrasi dan Koperasi) kepada anggota organisasinya. Ceramah tersebut mengenai KB²⁶

3. Ceramah kependudukan yang dilakukan oleh Dr. Haryono Soeyono kepada anggota organisasi Bhakti Wanita (Sekretariat Negara, Lembaga-lembaga Pemerintah Non Departemen dan Kesekretariatan Lembaga-lembaga Tinggi Negara)²⁷

4. Ceramah kependudukan yang dilakukan oleh S.iman Sujahri dan Soekati Tjokrowiromo, M.Sc kepada anggota Idhata (Depatemen Pendidikan Dasar dan Kebudayaan)²⁸

Ketiga, peninjauan terhadap kegiatan KB di beberapa provinsi atau kabupaten yang dilakukan oleh Dharma Wanita. Kegiatan peninjauan ini dilakukan untuk melihat perkembangan KB di wilayah tersebut. Selain itu, kegiatan ini juga bertujuan untuk menambah peserta baru dan membina peserta KB agar menjadi lestari. Contoh dari kegiatan ini yaitu peninjauan Pos Keluarga Berencana di desa Pagerwangi, Jawa Barat yang dilakukan oleh Dharma Wanita Pusat.²⁹

Keempat, pembangunan klinik KB oleh Dharma Wanita. Semakin meluasnya wilayah dan jangkauan program KB dalam pelita II, serta meningkatnya kesadaran masyarakat untuk melaksanakan KB membuat kebutuhan sarana layanan KB semakin banyak. Sarana utama untuk meningkatkan pelayanan kepada masyarakat adalah klinik KB, rumah sakit, serta team medis keliling. Dharma Wanita sebagai organisasi yang mendukung KB juga ikut membangun sarana layanan KB seperti klinik dan rumah sakit. Contoh pembangunan sarana layanan KB yang dibangun oleh Dharma Wanita:

a. Pembangunan rumah sakit bersalin Wikastri yang di dalamnya dilengkapi dengan klinik KB, klinik anak dan Lab. Rumah sakit ini dibangun oleh organisasi anggota Dharma Wanita yaitu O. W. D. Dutika Handayani (organisasi istri pegawai Departemen Luar Negeri)³⁰

²⁵ Kun Martiono, “Manise, Manise, Tanah Ambon Manise”, *Keluarga Berencana*, tanggal 15 Februari 1975, hlm. 23

²⁶ “kegiatan Organisasi Anggota Dharma Wanita”, *majalah Dharma Wanita*, Juni 1976, hlm. 7-13

²⁷ *Ibid.*,

²⁸ “Perayaan HUT RI”, *IDHATA*, 1974

²⁹ Dharma Wanita, *Dwi Windu Dharma Wanita 5 Agustus 1974-5 Agustus 1990*, *op.cit.*, hlm. 25

³⁰ “kegiatan Organisasi Anggota Dharma Wanita”, *majalah Dharma Wanita* Juni 1976, hlm. 7-13

²² *Ibid.*, hlm. 500

²³ *Ibid.*,

²⁴ *Ibid.*,

b. Klinik KB yang dibentuk oleh organisasi anggota Dharma Wanita yaitu Pertiwi (organisasi istri pegawai Departemen Dalam Negeri)³¹

DAMPAK DUKUNGAN DHARMA WANITA TERHADAP PROGRAM KB 1974-1979

KB menjadi salah satu program yang paling diandalkan oleh pemerintah Orde Baru untuk menekan laju pertumbuhan penduduk. Melalui KB angka kelahiran bayi tiap tahunnya dapat berkurang, sehingga laju pertumbuhan penduduk dapat ditekan. Angka kelahiran bayi inilah yang dijadikan patokan bagi pemerintah untuk menilai keberhasilan program KB. Hal ini dikarenakan sebenarnya tujuan utama dari KB sendiri adalah menekan angka kelahiran bayi.

Keberhasilan KB dalam menekan angka kelahiran bayi tentunya tidak dapat dipisahkan dari peran serta Dharma Wanita. Dharma Wanita sebagai organisasi wanita yang dibentuk oleh pemerintah Orde Baru, sangat mendukung semua program pemerintah saat itu. Termasuk memberikan dukungannya terhadap program pemerintah dalam menekan angka kepadatan penduduk melalui KB. Berbagai upaya dilakukan Dharma Wanita dalam mensukseskan program KB saat itu. Usaha yang dilakukan oleh Dharma Wanita dalam mensukseskan KB tentunya akan berdampak pada angka kelahiran saat itu. Berikut adalah tabel angka kelahiran menurut umur wanita di Indonesia pada masa pelita II (1974-1979):

Tabel 1

Angka Kelahiran Menurut Umur Wanita, Indonesia (1968-1979)

Age Specific Fertility Rates by Indonesia (1968-1979)

Referensi Waktu	Umur wanita/age of female (kelahiran per 1000 wanita)							TFR
	15-19	20-24	25-29	30-34	35-39	40-44	45-49	
1968 (1966-1970)	155	286	273	211	24	55	17	5,61
1972 (1970-1975)	127	265	256	199	118	57	18	5,2
1977 (1975-1979)	116	248	232	177	104	46	13	4,68

Sumber: Badan Pusat Statistik (BPS)

Berdasarkan tabel di atas maka dapat disimpulkan bahwa sebelum program KB diselenggarakan oleh pemerintah Orde Baru (1966-1970) TFR di Indonesia mencapai 5,61. Kemudian pada tahun 1970 pemerintah Orde Baru mencanangkan program KB sebagai program

nasional dan hal ini berdampak pada angka fertilitas. Pada tahun 1970-1975 TFR di Indonesia mencapai 5,2. Hal ini berarti angka fertilitas menurun sebesar 0,41 setelah dicanangkannya KB sebagai program nasional. Pada tahun 1974, pemerintah Orde Baru membentuk Dharma Wanita. pembentukan Dharma Wanita ini berdampak pada angka fertilitas, karena Dharma Wanita menjadi organisasi yang aktif dalam mensukseskan program KB. Pada tahun 1975-1979 TFR di Indonesia mencapai 4,68. Ini berarti angka fertilitas menurun sebesar 0,52.

KESIMPULAN

Usaha yang dilakukan oleh Dharma Wanita dalam mendukung program KB tahun 1974-1979 yaitu, pembuatan proyek KB, motivasi dan penerangan tentang KB dan kependudukan, peninjauan terhadap kegiatan KB Dharma Wanita di beberapa provinsi serta pembuatan klinik KB.

SARAN

Saran ini ditujukan kepada masyarakat secara luas, agar menghapus pandangannya bahwa organisasi Dharma Wanita dibentuk hanya untuk perkumpulan arisan istri-istri pegawai negeri sipil dan tidak bermanfaat bagi masyarakat. Berdasarkan hasil penelitian ini, dapat dilihat bahwa Dharma Wanita bukan hanya organisasi yang hanya digunakan untuk perkumpulan arisan istri-istri pegawai negeri sipil, tetapi Dharma Wanita dapat dikatakan sebagai organisasi wanita yang juga ikut mensukseskan pembangunan nasional. Dharma Wanita menjadi organisasi yang bermanfaat dalam mensukseskan pembangunan nasional, salah satu caranya yaitu dengan memberikan dukungannya terhadap program KB.

DAFTAR PUSTAKA

- Verslag Van De Derde Jaarmarkt-Tentoonstelling te Soerabaja Door J.E.Jasper*
Verslag Van De Vierde Jaarmarkt-Tentoonstelling te Soerabaja Door J.E.Jasper
Bataviaasch Nieuwsblad, 29 September 1928
De Indische courant, 15 Juni 1923
De Indische courant, 28 Juli 1923
Het Nieuws van den dag kleine courant, 18 Juli 1911
Het nieuws van den dag voor Nederlandsch-Indie, 25 April 1905
Soeara Publiek, 29 September 1926
 Brill, E.J. 1921. *Encyclopedie van Nederlandsch Indie VI*. Leiden.

³¹ *Ibid.*,

Dick, H.W. 2002. *Surabaya City of Work: A Socioeconomic History, 1900-2000*. Athens: Ohio University Press.

Dudung, Abdurahman. 1999. *Metode Penelitian Sejarah*. Jakarta: Logos wacana ilmu.

Dukut Imam, Widodo. 2002. *Soerabaia Tempoe Doeloe II*. Surabaya:Disparta.

Faber, G.H. Von. 1933. *Nieuw Soerabaia, De Gaschiedenis Van Indie's voor naamste koopstad in de eerste kwarteeuw sedert hare installing 1906-1931*. Soerabaia: Gemeente Soerabaia.

_____. 1931. *Oud Soerabaia, de Geschiedenis van Indie's Eerste Koopstad van de Oudste Tijden Tot de Instelling van Gemeenterad (1906)*. Soerabaia: Gemeente Soerabaia.

Handinoto. 1996. *Perkembangan Kota dan Arsitektur Kolonial Belanda di Surabaya 1870-1940*. Surabaya : Lembaga Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat Universitas Kristen Petra.

Lindblad, J. Thomas. 1998. *Sejarah Ekonomi Modern Indonesia; Berbagai Tantangan Baru*. Jakarta : LP3ES.

Prajudi, Atmosudirdjo. 1983. *Sejarah Ekonomi Indonesia dari Segi Sosiologi Sampai Akhir Abad XIX*. Jakarta: Pradnya Paramita.

Takashi, Siraishi. 1997. *Zaman Bergerak: Radikalisme Rakyat di Jawa 1912-1926*. Jakarta: Pustaka Utama Grafiti

Etnis di Surabaya, <http://basundoro-fib.web.unair.ac.id/> diakses tanggal 12-14-2012, jam 23.10

Kumpulan koran mengenai penyelenggaraan Jaarmarkt tahun 1905-1930, <http://kranten.kb.nl/>

